

Volume 4, Nomor 1, Juli 2003

ISSN 1412-1557

PELANGI PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Partisipasi Pembangunan

Model Pembelajaran yang Inovatif dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,

Pembelajaran di SD
yang Bercirikan
Konkret
Manipulatif

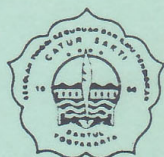
Minat Siswa Sekolah Dasar Terhadap Pelajaran Muatan Lokal

Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Relevansinya dengan Teknologi Dunia

Peranan Psikologi Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peran Keterampilan Mengelola Kelas dalam Proses Pembelajaran yang Efektif

Eksistensi Pendidikan Luar Biasa di Indonesia Dewasa ini



SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
CATUR SAKTI BANTUL YOGYAKARTA

Pelangi Pendidikan	Volume 4	Nomor 1	Halaman 1-80	Yogyakarta Juli 2003	ISSN 1412-1557
--------------------	----------	---------	--------------	----------------------	----------------

Volume 4, Nomor 1, Juli 2003

ISSN 1412-1557

PELANGI PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

Penerbit:

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
CATUR SAKTI

Alamat:

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Bantul, Yogyakarta 55714 Telp. (0274)367612

Pelindung:

Ketua Yayasan Catur Sakti

Ketua/Penanggungjawab:

Ag. Wahana

Ketua Penyunting/Redaksi:

Sumadi

Sekretaris Penyunting:

Sukardi, B. Suryosubroto

Anggota:

Djuwalman, Ardi Ris, Mulyoto, Bayudi, Edi S., Farida, Mardi Ak.

Lay Out:

Kris BR

Administrasi :

Maryanto, Edi K., Tukul PS.

ISSN:

1412-1557

No. 18.389/VI.3.03/ISSN/2001

Redaksi menerima sumbangan tulisan atau ringkasan hasil penelitian dari para pembaca. Redaksi berhak menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat, tanpa mengubah maksud dan isi.
Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

PELANGI PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

DAFTAR ISI

Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal dan Motivasi Berprestasi Terhadap Partisipasi Pembangunan Masyarakat, Edi Subarkah	1-17
Model Pembelajaran Yang Inovatif dalam Implementasi Kurikulum Bebrsasis Kompetensi, Anik Gufron,	18-24
Pembelajaran Di SD yang Bercirikan Konkret Manipulatif Terpadu, Suyatinah,	25-30
Minat Siswa Sekolah Dasar Terhadap Pelajaran Muatan Lokal, H. Sujati	31-43
Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Relevansinya dengan Teknologi Dunia Kerja, Sumadi	44-54
Peranan Psikologi Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, Muhammad Nur Wangid	55-64
Peran Keterampilan Mengelola Kelas dalam Proses Pembelajaran Yang Efektif, Mardjuki	65-72
Eksistensi Pendidikan Luar Biasa di Indonesia Dewasa Ini, Sukadari	72-78
Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup di SD dalam Berbagai Benturan Kepentingan, Heriyanto	79-80

peranan yang tidak kalah pentingnya. Kesadaran orang tua untuk mengirimkan anak yang menyandang ketunaan ke sekolah-sekolah, perlu diawali dengan kebesaran jiwa untuk menerima kenyataan. Jiwa besar ini akan tumbuh pada diri seseorang yang taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Dengan demikian tidak perlu ada pihak yang disalahkan, kemudian mengaitkan pada masalah kutukan Tuhan. Di dalam buku Rukun Iman, rukun yang ke enam adalah percaya Qodar dimana manusia diciptakan dengan Qodarnya sendiri, tidak pernah tahu yang bakal terjadi pada dirinya, termasuk seseorang diciptakan dengan menyandang ketunaan.

Dalam UUD 1945 pasal 31 dinyatakan : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”, Dan UUSPN No. 2/1989 Bab III Pasal 5 mencantumkan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”.

Jadi, jelas tidak ada perbedaan atas hak bagi mereka yang menyandang ketunaan maupun tidak. Semua mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang saja untuk menggalakkan upaya PLB ini, terutama mereka

yang mempunyai anak-anak yang menyandang ketunaan.

Dengan demikian diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengirimkan putra-putrinya yang menyandang ketunaan ke sekolah-sekolah akan meningkat. Penjaringan dari pihak-pihak yang berwenang tidak akan mengalami kesulitan. Sebaliknya tantangan untuk meningkatkan kesadaran ini harus pula diimbangi dengan antisipasi yang akurat dalam mempersiapkan fasilitas PLB yang diperlukan. Pada 11 (4) Bab IV UUSPN No. 2/1989 tentang **Satuan Jalur Jenis Pendidikan** menyatakan bahwa :

Pendidikan Luar Biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental.

Dari pasal tersebut di atas beserta penjelasannya, nampak bahwa UUSPN No. 2/1989 memberikan prospek yang lebih cerah bagi peserta luar biasa.”

II. Permasalahan yang perlu diperhatikan

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Tenaga pendidik dan kependidikan

EKSISTENSI PENDIDIKAN LUAR BIASA DI INDONESIA DEWASA INI

Oleh : Drs. Sukadari, MM

I. Pendahuluan

Beberapa propinsi di Indonesia yang menjadi sasaran bidang PLB, yang meliputi SLB, SDLB, Sekolah terpadu dan lain-lain sebagai faktor pendukungnya menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah cukup untuk memperhatikan kesempatan maupun prestasi yang dicapai oleh anak-anak luar biasa. Di pihak lain, masyarakat umum masih banyak yang belum sempat mengenyam fasilitas yang tersedia ini.

Mereka mungkin saja karena kesengajaan pihak orang tua atau keluarga untuk menyembunyikan, karena ketunaannya dianggap aib atau mungkin juga karena belum terjangkau oleh petugas-petugas yang bertanggung jawab di bidang ini. Apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan serta dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan luar biasa (PLB) ini masih jauh dari kondisi yang menggembirakan.

PLB memang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada sekolah umum. Dibandingkan

dengan sekolah-sekolah pada umumnya, PLB masih harus ditambahkan sarana khusus dalam proses belajar mengajarnya. Bangunan fisik sekolahnyapun harus mengikuti ketentuan dengan ciri-ciri khusus dan tenaga kependidikannyapun telah diatur menurut komposisi tertentu. Tenaga pendidiknya selain menguasai bidang studi, masih dituntut untuk berorientasi pada pembinaan terhadap anak didik yang luar biasa.

Seberapa jauh PLB ini dikenali oleh masyarakat kita, kiranya masih perlu dikaji lebih lanjut; mengingat penyelenggara pendidikan ini di tingkat kabupaten secara khusus tidak ada. Hanya merupakan bagian kecil dari penyelenggara bidang pendidikan dasar. Patut dikhawatirkan bahwa perhatian terhadap PLB masih belum tertuju secara sungguh-sungguh, sebab sejak adanya otonomi daerah, penanganannya diserahkan tingkat propinsi.

Di samping itu kesadaran dari masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki putra-putri penyandang ketunaan memegang

Tenaga pendidik pada sekolah-sekolah luar biasa di Indonesia sebagian besar adalah produk dari program khusus 1984-1985 yaitu SPG + 6 bulan program khusus PLB dan SGPLB yang sampai dengan saat ini pada umumnya masih belum banyak mendapat penataran lagi. Hal ini menjadi keluhan, namun kesempatan para guru mengikuti penataran yang sangat terbatas. Penyelenggaraan penataran itu sendiri juga amat langka. Lebih-lebih tenaga pendidikan lainnya. Kesempatan semacam itu menjadi amat sulit didapat. Padahal mereka pun berkepentingan dalam penyelenggaraan PLB ini. Misalnya mereka yang mengelola proyek pembangunan sarana dan prasarana PLB, atau mereka yang mengelola penyelenggaraan sekolah-sekolah swasta tanpa mengetahui 'anatomi' dari PLB itu, patut dikawatirkan bahwa segala sesuatunya akan menjadi tidak berdaya guna, sebab *plamatig*, *rechmatig* maupun *doelmatig* tidak cukup hanya dilihat dari aspek keuangansaja tetapi aspek substansi yang justru merupakan fokus kepentingan

dari terselenggaranya PLB ini sering terabaikan.

Perizinan sekolah-sekolah swasta pun tentu harus mempertimbangkan aspek substansi dan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah luar biasa ini. Sekolah luar biasa tidak sama dengan sekolah biasa. Ciri-ciri serta sarana-sarana khusus harus selalu diperhatikan. Adapula sebagian motivasi di daerah-daerah yang mendirikan sekolah swasta dengan tujuan setelah satu atau dua tahun mengajukan permohonan untuk dinegerikan termasuk guru-gurunya.

Di sekolah-sekolah luar biasa masih terdapat guru-guru yang sama sekali belum pernah mendapat pendidikan atau penataran tentang PLB, yaitu guru-guru agama dan keterampilan. Guru-guru tersebut tidak dipersiapkan secara khusus untuk diterjunkan di lingkungan pendidikan luar biasa. Di SLB/SDLB yang kekurangan guru bidang studi, sering memanfaatkan guru-guru tersebut untuk bertugas rangkap mengajar bidang studi.

Sebagai contoh, salah satu SDLB tidak memiliki guru bidang studi Matematika untuk kelas IV. Maka guru agama itu

ditunjuk untuk mengajar bidang studi tersebut. Dapat dibayangkan apa yang terjadi; ternyata dia seorang guru agama yang kurang memiliki wawasan pendidikan luar biasa. sejak guru itu mengajar bidang studi. Kepala sekolah pun mengeluh bahwa murid-muridnya satu per satu meninggalkan sekolah. Padahal, sesungguhnya anak-anak itu masih ingin belajar karena sering terlihat berada di sekitar sekolah. Sedangkan cara mengajar bidang studi agama yang menjadi tanggung jawabnya pun dirasakan kurang tepat.

2. Sarana dan prasarana

Pada umumnya, lokasi SDLB terletak di pinggir kota dengan jarak jangkau yang relatif sulit. Asrama bagi murid, transportasi, atau pondok guru merupakan keluhan umum. Sedangkan SLB biasanya masih lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Masalahnya SLB pada umumnya hanya menerima satu jenis kelainan/ketunaan saja, sehingga jenis yang lain harus mencari SLB lain yang sesuai. Padahal SDLB adalah untuk menampung semua jenis kelainan, tetapi ter-

bentur pada masalah lokasi. Apabila ada asramanya orang tua juga dibebani biaya asrama, karena penyelenggara asrama ini tidak dapat sepenuhnya menggantungkan biaya dari dinas. Keterlambatan atau kekurangan jumlah biaya akibat perubahan jumlah penghuni asrama sering dialami. Walaupun khusus untuk SDLB masih ada bantuan subsidi dari Departemen Sosial.

Selanjutnya apabila asrama terselenggara, 'managemen'-nya biasanya kurang bagus, karena tidak ada petugas khusus pengelola asrama, sehingga sering dijabat rangkap oleh guru bahkan oleh Kepala Sekolah. Lain halnya dengan sekolah-sekolah luar biasa yang diselenggarakan oleh swasta. Biasanya managemennya lebih baik. Sebaliknya apabila asrama memang tidak ada maka pihak sekolah memang perlu memiliki kendaraan antar jemput murid maupun guru, agar proses belajar-mengajar di sekolah dapat dipertahankan. Untuk para guru pondok guru merupakan kebutuhan penting, karena masalah papan merupakan kebutuhan dasar yang membuat guru tenang bekerja dan dapat

mençurahkan segala potensinya untuk kepentingan anak didiknya.

Pengadaan buku paket, buku-buku pedoman guru dan lain-lain juga dirasakan masih kurang, terutama di sekolah-sekolah yang termasuk daerah terpencil. Sarana pendidikan lainnya terutama alat bantu untuk para tunanetra sering tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh kasus.; di suatu SLB A (tunanetra) swasta terdapat alat tulis Braille (reglet) dan tongkat putih yang tidak dapat dipakai. Setelah dilihat dan ditanyakan ternyata kedua alat itu merupakan sumbangan dari suatu instansi pemerintah yang pembuatannya tidak melalui konsultasi terlebih dahulu pada pihak Depdiknas. Regletnya hanya dua baris dan pada keempat sudut tidak terdapat kunci-kunci, sehingga apabila dipakai menulis Braille kertas menjadi tergeser/bergerak. Hal ini membuat anak-anak merasa terganggu. Tongkat putih yang kurang panjang dan pada ujungnya tidak terdapat bagian yang membuat getaran tongkat menjadi lentur, sehingga hanya bisa dipakai oleh orang yang melek yang sudah segar yang memerlukan bantuan tongkat. Alat bantu untuk para tuna wicara juga kurang diperhatikan.

Di beberapa SDLB yang sebagian besar muridnya adalah berkecailainan B ternyata hanya memiliki satu alat untuk latihan artikulasi dan berada di ruang Kepala Sekolah. Frekuensi pemanfaatannya sangat kurang. Ada kesan seolah-olah kurikulum SD-nya lebih menonjol dibandingkan dengan LB-nya. Sedangkan, bagi anak-anak LB untuk dapat mengikuti kurikulum SD-nya sudah harus terangkat dari permasalahan dasar LB-nya terlebih dahulu. Masalah lain yang menyangkut kesejahteraan guru adalah masalah tunjangan guru SDLB yang disamakan dengan guru-guru SD. Bukannya disamakan dengan guru-guru SLB. Padahal guru-guru SDLB justru menghadapi berbagai masalah kelainan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada proses belajar-mengajar.

3. Sekolah Terpadu

Pada umumnya, sekolah-sekolah umum tidak mau repot dengan menerima murid yang menyandang kelainan. Hal ini dianggap merupakan pekerjaan tambahan yang tidak ada imbalannya. Juga belum diatur dalam upaya menambah angka kredit guru.

Keputusan Mendikbud No. 002/0/1986 tentang pendidikan

terpadu Bagi Anak Cacat tertanggal 4 Januari 1986 dan edaran Dirjen Dikdasmen No. 6718/C/I/89 tertanggal 15 Juli 1989 tentang Perluasan Kesempatan Belajar Bagi Anak Berkelainan di Sekolah Terpadu. belum dikenal oleh kebanyakan guru dan kepala sekolah. Dalam era globalisasi di dunia pendidikan dalam arti sekolah terpadu perlu dikembangkan dan perlu lebih dipersiapkan dengan sarana pendukungnya, khususnya para guru pembimbing khusus.

III. Penutup

Demikian secara empirik yang merupakan *fact finding* di lapangan yang dijumpai beberapa tempat tertentu tetapi cukup mewakili permasalahan PLB pada umumnya. Kiranya dapat dijadikan materi diskusi untuk dicarikan jalan keluar sehingga dapat dirumuskan suatu upaya nyata untuk peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita yang menyandang kelainan. Sehingga potensi yang mereka miliki lebih berdaya guna bagi kepentingan pembangunan manusia seutuhnya, negara, bangsa, dan agama.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Data/Informasi Keadaan Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta, SDLB dan Sekolah Terpadu*. Jakarta
- Murni Tjahyati Firus Lastri. (1991). *Beberapa Permasalahan Pendidikan Luar Biasa di Lapangan*. Seminar Nasional di Bandung.
- Polloway E.A., Payney J.S. Patton J.R & Payney R.A. (1985). *Strategis For Teaching Retarded and Special Need Children*, Charles-E. Merrill Colombus.
- Sukarno Anton. (1980). *Penelitian Tentang Anak Berkelainan di Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta*. FKIP UNS, SURAKARTA.

*) Pengajar STKIP Catur Sakti Yogyakarta